

Perancangan Pengarusutamaan Gender dengan Menggunakan *Women's Empowerment Framework* di Desa Senggreng Kabupaten Malang

Designing Gender Mainstreaming by Using Women's Empowerment Framework in Senggreng Village Malang Regency

¹Juwita Hayyuning Prastiwi, ²Andy Ilman Hakim

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

Korespondensi: Juwita Hayyuning Prastiwi, juwita_hayyu@ub.ac.id

Naskah Diterima: 19 Desember 2023. Disetujui: 5 Juni 2024. Disetujui Publikasi: 2 Oktober 2024

Abstract. The community service activity was carried out to encourage gender-responsive policies for the Senggreng Village Government, Sumberpucung District, Malang Regency. The objectives of this activity include obtaining the results of a gender analysis of the existing conditions of female villagers. Second, a design for the implementation of gender mainstreaming must be developed. Third, to convey the results of the PUG assessment to the village government. The gender analysis process was carried out using Longwe's Women's Empowerment Framework (WEF) method, which includes five aspects: welfare, access, awareness, participation, and control. The analysed data was obtained based on two data collection methods: a survey of female villagers and a study of village government documents. The results of the study showed that there were several gender gaps in Senggreng Village, so the final result of this service activity was recommendations based on the three aspects of gender needs, which are specific, practical gender needs, and strategic gender needs.

Keywords: *Gender mainstreaming, gender needs, longwe analysis, village politics.*

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendorong kebijakan yang responsif gender bagi Pemerintah Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Tujuan kegiatan ini antara lain *Pertama*, untuk memperoleh hasil analisis gender terhadap *existing condition* warga desa perempuan. *Kedua*, untuk menyusun perancangan implementasi PUG. *Ketiga*, tersampainya hasil tinjauan PUG kepada pemerintah Desa. Proses analisis gender dilaksanakan dengan metode Women's Empowerment Framework (WEF) oleh Longwe yang mencakup lima aspek yakni kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol. Data yang dianalisis, diperoleh berdasarkan dua metode pengumpulan data yakni survei terhadap warga desa perempuan serta studi dokumen pemerintah desa. Hasil analisis menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan gender di Desa Senggreng, sehingga hasil akhir kegiatan pengabdian ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang disusun berdasarkan tiga aspek kebutuhan gender yakni kebutuhan gender spesifik, kebutuhan gender praktis, dan kebutuhan gender strategis.

Kata Kunci: *Pengarusutamaan gender, kebutuhan gender, analisis longwe, politik desa.*

Pendahuluan

Arah pembangunan desa, tidak boleh dilepaskan dari upaya mengkomodifikasi kepentingan perempuan. Perihal ini telah diatur dalam sejumlah peraturan di antaranya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDPT No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta berbagai Permendes PDPT yang diundangkan setiap tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa misalnya, sebagai upaya percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat, memiliki salah satu tujuan yakni Desa Ramah Perempuan (Aryani & Kusumaningrum, 2023). Begitu pula dalam konteks Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Permendes PDPT No. 7 Tahun 2023, telah menempatkan perempuan sebagai salah satu kelompok rentan.

Persoalan pemerintahan dan pembangunan memang secara khusus sangat terkait dengan seberapa dalam perempuan dilibatkan di dalam praktik tata kelola desa. Dalam konteks pembangunan, kesenjangan gender akan tampak dalam perbedaan pemanfaatan akses, partisipasi, kontrol, dan lebih jauh adalah kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian bermitra dengan Pemerintah Desa Senggreng yang terletak di Kecamatan Sumberpucung di Kabupaten Malang. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Senggreng adalah sebesar 9,157 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 4,581 (50.02% dari total populasi). Meski data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2019 adalah Desa mandiri, namun sebanyak 1.381 penduduk masih masuk kategori miskin. Selain itu dari aspek Pendidikan, mayoritas penduduk merupakan lulusan SD.

Secara umum di wilayah Malang Raya, kabupaten Malang sebagai lokasi kegiatan menunjukkan adanya kesenjangan gender di berbagai bidang. Salah satunya, bahwa Kabupaten Malang merupakan pengirim buruh migran terbesar kedua di Jawa Timur yaitu sebesar 7.650 pada tahun 2019 (BPN2TKI, 2019). Kemudian pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Malang memiliki indeks terendah sebesar 70,36. Sedangkan untuk dua wilayah lain yaitu Kota Malang dan Kota Batu berturut-turut memperoleh capaian 81,45 dan 75,90. Pada tahun 2020 kemiskinan di Kabupaten Malang adalah sebanyak 65.560 jiwa dengan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,37 (BPS Kabupaten Malang, 2020).

Kembali mengenai pertimbangan pemilihan Desa Senggreng, selain mengacu pada isu-isu di atas juga karena adanya kepemimpinan perempuan yang diharapkan akan memberi perubahan terhadap kualitas hidup perempuan. Sejak tahun 2020, Pemerintah Desa Senggreng dipimpin kepala desa perempuan dan berhasil memperoleh beberapa penghargaan seperti inovasi Pecel Tempe Mendoan (Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan), Kepala Desa Terfavorit melalui Anugerah Desa Terbaik TIK Kabupaten Malang 2022 (Malang Times, 2022). Pada Agustus 2022 Pemerintah Desa Senggreng mendapatkan penghargaan dari Bupati Malang terhadap inovasi Pecel Tempe Mendoan tersebut (Malangkab, 2022). Di tahun yang sama Pemerintah desa Senggreng juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai juara pertama dalam lomba video pendek oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur (Javasatu, 2022). Kemudian di akhir 2022, pemerintah Desa Senggreng mendapatkan penghargaan melalui program asuransi jiwa. Penghargaan diberikan oleh Bupati Malang yang diserahkan pada malam resepsi Peringatan Hari Jadi ke-1262 Kabupaten Malang (Batu Times, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, kegiatan pengabdian di Desa Senggreng adalah perancangan PUG. Pemerintah nasional dalam hal ini, telah mencanangkan *gender mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG), di mana pengintegrasian perspektif gender, melalui analisis gender, dilakukan untuk memastikan agar tiap program pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan.

Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema PUG, umumnya membahas untuk tingkat Kabupaten/Kota (Daud Nawir dkk., 2023; Eti Jumiati, 2020; Nur Hafida, 2019; Valentina, 2019; Winarti dkk., 2023) namun tidak sedikit pula yang dilakukan dalam konteks desa (Fatmawati dkk., 2023; Kusuma dkk., 2022; Susanti dkk., 2023; Wahyuni dkk., 2023). Sebagai catatannya, baik kegiatan pengabdian di tingkat kabupaten/kota maupun desa, mayoritas berfokus pada kegiatan sosialisasi atau pelatihan tanpa sebelumnya melalui tahap analisis gender. Padahal dalam PUG, analisis gender merupakan tahapan yang sangat esensial, yang berkenaan dengan ragam metode guna memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan, akses mereka terhadap sumber daya, aktivitas, serta keterbatasan yang dihadapi (Martiany, 2011).

Adanya isu-isu perempuan di Kabupaten Malang, serta hadirnya kepala desa perempuan di Desa Senggreng diharapkan mampu menjadi katalisator dalam upaya perbaikan hidup perempuan. Tujuan kegiatan ini antara lain Pertama, untuk memperoleh hasil analisis gender terhadap *existing condition* warga desa perempuan. Kedua, untuk menyusun perancangan implementasi PUG. Ketiga, tersampainya hasil tinjauan PUG kepada pemerintah Desa. Kegiatan dengan pemerintah desa ini, menunjukkan bahwa pemerintah desa ditempatkan sebagai hulu kebijakan publik yang dianggap mampu mempengaruhi tatanan kultur politik yang hendak dicapai. Apakah hendak memberi perhatian pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, lebih jauh apakah hendak mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Pengabdian ini diselenggarakan secara intensif, selama kurun waktu empat bulan (Juli – November tahun 2023).

Khalayak Sasaran. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemerintah Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Metode Pengabdian. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan dengan metodenya masing-masing yakni:

1. Pertemuan pendahuluan bersama kepala desa dengan agenda penyamaan persepsi serta perizinan, tahapan ini dilaksanakan dengan cara diskusi.
2. Pengumpulan Data Existing Condition perempuan desa, dengan pengumpulan dokumen pemerintah desa serta survei. Adapun survei dilaksanakan secara kuantitatif, dengan penentuan sampel acak berlapis (*stratified random sampling*)
3. Analisis gender yang dilakukan dengan metode analisis Women's Empowerment Framework (WEF) oleh Longwe.
4. Penyampaian rekomendasi dan diskusi.

Indikator Keberhasilan. Kegiatan Perancangan PUG dengan metode WEF di Desa Senggreng kabupaten Malang dapat dikatakan berhasil apabila masing-masing tahapan tercapai sebagai berikut. Indikator keberhasilan tahap 1 adalah adanya pemahaman dan kesepakatan bersama, yang termaktub dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara tim pengabdian dengan Pemerintah Desa Senggreng. Indikator keberhasilan tahap 2 adalah terkumpulnya dokumen-dokumen desa, serta terlaksananya kegiatan survei *existing condition* terhadap 233 orang warga desa perempuan. Indikator keberhasilan tahap 3 adalah adanya dokumen laporan yang

berisi analisis kesenjangan gender berdasarkan WEF, terhadap dokumen desa serta hasil survei. Indikator keberhasilan tahap 4 adalah tersampainya hasil analisis gender serta rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Desa Senggreng.

Metode Evaluasi. Evaluasi kegiatan pengabdian ini, dilakukan dengan metode wawancara terhadap Pemerintah Desa Senggreng yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat-perangkat desa. Kegiatan evaluasi dilakukan setelah kegiatan penyampaian rekomendasi dan diskusi selesai di Balai Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan Pertemuan Pendahuluan

Pertemuan pendahuluan melibatkan tim pengabdian kepada masyarakat dengan Kepala Desa Senggreng, Kabupaten Malang. Berlokasi di Balai Desa Senggreng, pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan tim pengabdian, penyampaian maksud dan tujuan kedatangan, mendiskusikan rencana kerja sama (termasuk rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat), penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta perizinan kegiatan.



Gambar 1. Penandatanganan PKS

Dokumen PKS ditandatangani antara Kepala Desa Senggreng dengan Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya yang sekaligus merupakan tim kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen PKS merupakan payung hukum, dalam rangka implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan kemitraan lain yang disepakati untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

B. Kegiatan Pengumpulan Data *Existing Condition* Perempuan Desa

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yakni survei dan studi dokumen. survei dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan melibatkan 25 orang enumerator dari kalangan mahasiswa. Desain survei dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran kuantitatif tentang tren, sikap, dan pendapat suatu populasi, atau menguji hubungan antar variabel dalam suatu populasi, dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut (Creswell, 2018).

Penentuan sampel, dilakukan berdasarkan pemilihan sampel acak berlapis (*stratified random sampling*). Metode sampel acak berlapis sendiri adalah proses pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam strata-strata, kemudian memilih sampel acak setiap strata, lalu menggabungkannya untuk

menaksir parameter populasi (Ulya dkk., 2018). Stratifikasi ini berarti bahwa karakteristik tertentu dari individu (misalnya, gender—perempuan) terwakili dalam sampel dan sampel mencerminkan proporsi sebenarnya dalam populasi individu yang memiliki karakteristik tertentu. Praktik penentuan sampel dalam kegiatan ini dimulai dengan membagi populasi berdasarkan jenis kelamin, lalu jumlah responden dihitung dari total populasi perempuan.

Berdasarkan data profil desa, total jumlah penduduk di Desa Senggreng tercatat sebesar 9,157 dengan jumlah perempuan sebesar 4,581 (50.02% dari total populasi). Berdasarkan jumlah penduduk perempuan tersebut, kuesioner diberikan kepada 233 orang dengan Margin of Error (MoE) sebesar 8%. Rentang usia responden yakni kurang dari 18 tahun sebanyak 1%, usia 18 – 25 tahun sebanyak 5%, usia 26-35 tahun sebanyak 15%, usia 36-45 tahun sebanyak 25%, dan usia lebih dari 55 tahun sebanyak 27%. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden lulusan SD/MI sebanyak 36%, kemudian lulusan SMP/Mt sebanyak 23%, lulusan SMA/SMK/MA sebanyak 33%, lulusan Diploma sebanyak 1%, lulusan S1 sebanyak 4%, dan tidak sekolah sebanyak 3%. Sebesar 97% responden beragama Islam dan 81% menikah.



Gambar 2. Pengumpulan data survei

Kuesioner yang disebarakan terdiri dari 9 (sembilan) sub pertanyaan antara lain profil responden, pertanyaan tentang kesehatan, pertanyaan tentang pendapatan, pertanyaan tentang isu perempuan dan anak, pertanyaan tentang partisipasi masyarakat, pertanyaan tentang akses dan fasilitas desa, pertanyaan tentang kepemimpinan perempuan, pertanyaan tentang perekonomian desa, dan terakhir pertanyaan tentang inovasi pemerintah desa

C. Kegiatan Analisis Gender

PUG idealnya diterapkan pada seluruh aspek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun pemerintah nasional baru merinci PUG terutama pada aspek perencanaan yang dikenal dengan konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Oleh karenanya proses analisis PUG dalam kegiatan ini, diarahkan secara khusus untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi yang mendorong implementasi PPRG di Desa Senggreng.

Dalam rangka mencapai rekomendasi tersebut, analisis kesenjangan gender dilakukan terhadap hasil survei dan dokumen desa dengan menggunakan Women's Empowerment Framework (WEF) dari Longwe yang meliputi lima aspek yakni kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol.



Gambar 3. Womens empowerment framework (WEF) (Longwe, 1991)

Welfare (kesejahteraan) mengacu pada kebutuhan materiil perempuan seperti makanan, pendapatan, serta pelayanan kesehatan. *Access* (akses) mengacu pada bagaimana perempuan mendapatkan akses seperti tanah, kredit, pekerjaan, pelatihan, pelayanan publik, dan sebagainya. *Conscientization* (kesadaran) mengacu pada kepercayaan perempuan bahwa peran gender dapat berubah dan kesetaraan gender dapat terjadi. *Participation* (partisipasi) mengacu pada kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam setiap program dan kebijakan. Terakhir adalah *control* (kontrol), yang mengacu pada kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki kontrol setara dalam produksi dan distribusi manfaat, tanpa ada dominasi dan subordinasi.

Berdasarkan hasil survei terhadap 233 responden perempuan, menunjukkan profil warga desa perempuan serta isu-isu yang dihadapi oleh mereka antara lain bahwa 36% warga desa perempuan adalah lulusan SD, 23 % lulusan SLTP, 33% lulusan SLTA, 4% lulusan S1, 1 % lulusan Diploma, sedangkan 3% tidak sekolah. Kemudian dari aspek pekerjaan, mayoritas responden (sebanyak 137 orang) adalah ibu rumah tangga, sisanya terbagi ke dalam wirausaha, pendidik, petani, buruh, pensiunan, dan pelajar/mahasiswa. Isu gender yang berhasil di *capture* di dalam survei, secara umum dapat dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) isu yakni isu kesehatan, isu pendapatan, isu perempuan dan anak, isu partisipasi masyarakat, isu akses dan fasilitas desa, isu kepemimpinan perempuan, serta isu perekonomian desa.

Data kondisi kesehatan warga desa perempuan menunjukkan bahwa 54% dari responden menyatakan mengalami status gangguan kesehatan dan sebanyak 46% lagi menyatakan tidak. Sumber utama pendapatan warga perempuan antara lain, sebesar 41% responden menyatakan bahwa mereka tidak bekerja, maka sumber utama pendapatan mereka berasal dari suami atau keluarga lain. Sementara itu, 30% dari responden menyebutkan bahwa sumber pendapatan mereka berasal dari usaha sendiri, sedangkan 15% dari responden mendapatkan pendapatan dari gaji atau penghasilan tidak tetap, 13% responden mendapatkan pendapatan dari pekerjaan tidak tetap, dan terakhir sebesar 1% responden mengatakan bahwa sumber utama pendapatan mereka berasal dari pensiunan.

Berikutnya pada aspek isu perempuan dan anak di Desa Senggreng, sebanyak 90% masyarakat Desa Senggreng menyatakan tidak mengetahui tentang kesenjangan gender dan hanya 10% yang menyatakan tahu tentang hal tersebut. Meski demikian, sebanyak 20% responden yang mengetahui, menyebutkan eksisnya beberapa jenis kesenjangan gender antara lain kesenjangan pendidikan sebesar 30%, kurangnya wadah bagi perempuan sebesar 22%, akses perempuan untuk pekerjaan sebesar 17%, perbedaan upah untuk pekerjaan yang sama sebesar 13%, derajat laki-laki masih ditinggikan sebesar 9% dan terakhir adalah pemaksaan pernikahan (termasuk pernikahan anak) dan kekerasan terhadap perempuan (verbal, fisik, psikis, dan seksual) sebesar 4%.

Masih berkaitan dengan isu perempuan dan anak, sebanyak 94% masyarakat Desa Senggreng menyatakan tidak mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan hanya 6% yang menyatakan mengetahui. Dari sebanyak 6% responden yang mengetahui tindak kekerasan ini, menyebutkan 5 (lima) bentuk kekerasan yang terjadi di antaranya, kekerasan fisik dengan persentase sebesar 38%, kekerasan fisik 15%, kekerasan seksual (pelecehan hingga pemerkosaan) 8%, tidak mendapatkan hak pendidikan 31%, dan terakhir pernikahan anak (sebelum usia 19 tahun) sebesar 7,7%. Selain itu, isu-isu perempuan lain yang tampak di antaranya adalah isu akses perempuan terhadap pekerjaan, infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan ibu dan anak, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan ibu dan anak, dan pendidikan perempuan.

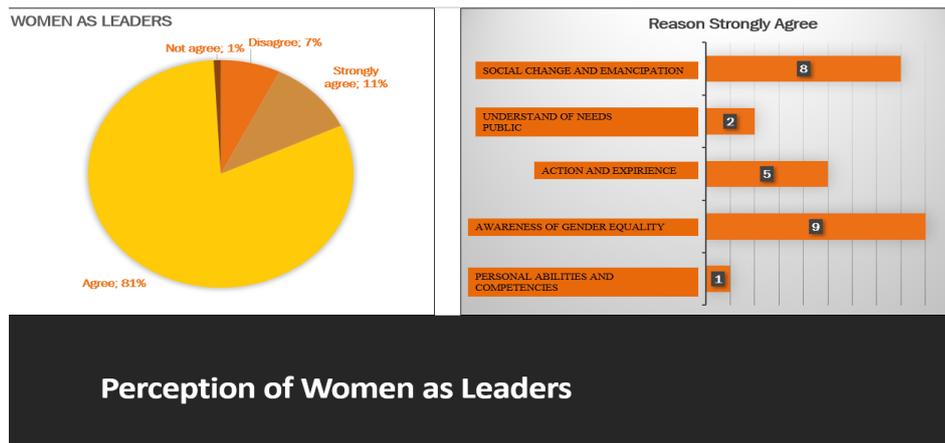
Berdasarkan adanya isu perempuan dan anak, hasil survei selanjutnya dikaitkan dengan peran pemerintah desa dalam penanganan isu-isu tersebut sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Sebanyak 61% masyarakat menyatakan ya terhadap persepsi kontribusi pemerintah desa terhadap upaya penanganan isu-isu perempuan dan 39% menyatakan tidak.

Kemudian berkenaan dengan partisipasi dan organisasi di tingkat desa yang diikuti oleh Warga Desa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga perempuan dalam organisasi kemasyarakatan sangat rendah di mana sebanyak 26% menyatakan ikut dalam organisasi sedangkan 74% menyatakan tidak terlibat dalam organisasi mana pun. Bagi 26% yang mengikuti organisasi menyebutkan 6 (enam) jenis organisasi antara lain PKK, Koperasi Desa, kelompok lobi/Profesi, kelompok berbasis keagamaan (Fatayat/Muslimat, Aisyiah, dll), karang taruna, dan kader posyandu.

Keterlibatan warga perempuan dalam musyawarah desa juga sangat rendah, dengan angka sebanyak 83% dari responden tidak pernah terlibat dalam musyawarah desa, sementara 17% dari responden mengatakan sebaliknya. Responden yang pernah terlibat dalam kegiatan musyawarah desa, tersebar sebagai partisipan dalam 7 (tujuh) bentuk musyawarah antara lain 1 (satu) responden pernah mengikuti musyawarah PKH, 25 responden mengikuti musyawarah desa, 9 (sembilan) responden mengikuti musyawarah dusun, 1 (satu) responden mengikuti musyawarah KPPS, 1 (satu) responden mengikuti musyawarah Pilkada, 2 (dua) responden mengikuti musyawarah RT, dan 2 (dua) responden lainnya mengikuti musyawarah UMKM. Dalam praktik musyawarah desa, terdapat beberapa alasan ketidakhadiran warga dalam acara tersebut, antara lain sebanyak 62% dari masyarakat mengaku tidak diundang, 29% diwakili oleh bapak atau suami, 7% menyatakan bahwa mereka tidak punya waktu, sedangkan 2% sisanya menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk ikut dalam musyawarah desa.

Salah satu temuan menarik adalah tentang persepsi terhadap pemimpin perempuan, di mana sebanyak 11% responden menyatakan sangat setuju terhadap pemimpin perempuan, 81% responden menyatakan setuju, sedangkan 7% kurang setuju, dan hanya 1% menyatakan tidak setuju. Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat Desa Senggreng setuju perempuan menjadi seorang pemimpin, yakni sebanyak 8 (delapan) responden menyatakan karena perubahan sosial dan emansipasi, 2 (dua) responden dikarenakan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, 5 (lima) responden dikarenakan kinerja dan pengalaman, 9 (sembilan) responden karena kesadaran akan kesetaraan gender dan satu responden menyatakan karena kemampuan dan kompetensi pribadi.

Pada isu pemimpin perempuan, terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat Desa Senggreng setuju perempuan menjadi seorang pemimpin. Sebanyak 37 responden menyatakan setuju karena merupakan bagian dari perubahan sosial dan emansipasi, sebanyak 53 responden menyatakan karena kebutuhan masyarakat, 25 responden menyatakan karena kinerja dan pengalaman, 58 responden menyatakan



Gambar 4. Data persepsi terhadap perempuan sebagai pemimpin

karena kesadaran akan kesetaraan gender, dan sebanyak 16 responden dikarenakan kemampuan dan kompetensi pribadi. Sedangkan sebagian kecil responden menyatakan tidak setuju dengan alasan, satu responden menganggap kinerja dan pengalaman, sebanyak 4 (empat) responden menyatakan laki-laki lebih tegas, sebanyak 13 responden menyatakan lebih baik laki-laki yang menjadi seorang pemimpin, dan satu responden menyatakan karena prinsip agama.

Data tentang persepsi terhadap pemimpin perempuan, dapat dikaitkan dengan harapan kepada pemimpin perempuan di mana 48% menyatakan pemimpin perempuan harus memprioritaskan kebutuhan pembangunan desa secara umum, 24% menyatakan pemimpin perempuan harus memprioritaskan kebutuhan dasar perempuan dan anak, 16% menyatakan pemimpin perempuan harus memandang kebutuhan perempuan dan laki-laki sama, dan 12% menyatakan bahwa pemimpin perempuan harus mewakili suara perempuan dalam pengambilan keputusan.

Data terakhir berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan desa, menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah desa. Sebanyak 30% responden menyatakan upaya pemberdayaan dilakukan melalui UMKM atau bantuan permodalan, 8% responden menyatakan upaya pemberdayaan dilakukan melalui bantuan pertanian sosial, 13% responden menyatakan upaya pemberdayaan melalui Bumdes/Wisata Desa, 6% menyatakan dilakukan melalui lapangan pekerjaan (wiraswasta khusus perempuan), sebanyak 22% menyatakan dilakukan melalui pemberdayaan atau pelatihan, 3% menyatakan melalui pengembangan koperasi desa, sedangkan sebanyak 18% menyatakan tidak tahu.

Selain hasil survei, existing condition warga desa perempuan di Senggreng, juga dapat dilihat melalui berbagai data desa. Di antara data desa yang ada, tim pengabdian dapat mengakses sebagian data dari website <http://senggreng-malangkab.desa.id/>, sedangkan sisanya dari data profil desa yang diberikan oleh pemerintah desa. Gambar 5 di bawah adalah data mengenai anggaran desa.

Berdasarkan data APB Desa, tampak bahwa anggaran desa terbesar difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang menghabiskan sebesar 42% dari total anggaran, disusul kegiatan penanggulangan bencana sebesar 31% anggaran, kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 14%, kegiatan pembangunan desa sebesar 9% dan kegiatan pembinaan masyarakat yang menghabiskan sebesar 4% anggaran. Sayangnya, tim pengabdian tidak mendapatkan rincian penggunaan anggaran desa, sehingga tidak diketahui detail berapa persen anggaran non kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang difokuskan bagi perempuan dan anak.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis menggunakan analisis gender WEF dari Longwe. Lima level analisis kesetaraan dan pemberdayaan gender dari Longwe dijelaskan sebagai berikut, kesejahteraan merujuk pada kesetaraan



Gambar 5. APB Desa Senggreng, tahun 2023

material mencakup pendapatan, makanan, dan kesehatan. Akses merujuk pada kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan terhadap faktor-faktor produksi seperti tanah, pekerjaan, pelatihan, fasilitas pemasaran ekonomi, pelayanan publik, termasuk kesetaraan kesempatan dalam hidup (misalnya dihapusnya hukum yang diskriminatif). Kesadaran merujuk pada bagaimana kedua gender memahami konsep gender serta seluruh dampaknya dalam kehidupan. Partisipasi merujuk pada kesetaraan keterlibatan perempuan dan laki-laki pada setiap level, termasuk dalam proyek pembangunan. Kontrol merujuk pada bagaimana perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan dalam mengendalikan semua sumber daya dan manfaatnya (Husna & Haryanti, 2021; UNRWA, 2011).

Berikut ini adalah analisis gender yang dilakukan, dengan menggunakan analisis gender WEF Longwe di Desa Senggreng:

Tabel 1. Analisis WEF

Level Partisipasi	Deskripsi
Welfare	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 7,01% atau 742 penduduk berstatus pengangguran, sedangkan mayoritas penduduk lainnya yakni sebesar 30,05% atau 3.183 orang bekerja sebagai buruh atau pekerjaan di sektor informal lain. Secara spesifik terkait perempuan, sebanyak 41% perempuan tidak bekerja. • Sebesar 22% responden mengaku mengalami kesulitan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. • Sebesar 64% responden merupakan penerima bantuan sosial. Apabila didasarkan pada data desa maka sebanyak 1.381 merupakan keluarga miskin. • Terdapat gangguan kesehatan yang dialami sebanyak 126 orang dengan rincian 51% mengalami gangguan kesehatan ringan, 32% mengalami gangguan kesehatan sedang, 13% mengalami gangguan kesehatan berat, dan 4% mengalami gangguan kesehatan sangat berat. • Adanya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual (pelecehan hingga pemerkosaan), tidak mendapatkan hak pendidikan, serta pernikahan anak (sebelum usia 19 tahun).
Access	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 91,80% atau 214 responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas desa dan hanya 8,20% atau 19 responden menyatakan sebaliknya. Terdapat dua alasan kesulitan yang dialami masyarakat dalam mengakses fasilitas desa yakni lokasi yang jauh dan prosedur yang berbelit-belit. • Kondisi pelayanan kesehatan tergolong baik menurut 75,27% atau 175 responden, cukup baik menurut 18,08% atau 42 responden, sangat baik menurut 6,01% atau 14 responden, dan tidak baik menurut 0,86% atau 2 responden. • Alokasi perencanaan dalam APB Desa, terfokus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibandingkan empat bidang lain (pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana). • Anggaran spesifik untuk perempuan desa belum visible • Sebanyak 62% responden perempuan, mengaku tidak diundang dalam pertemuan pengambilan keputusan di tingkat desa. Sedangkan 29% lainnya mengaku diwakili oleh suami dalam kegiatan tersebut.

Level Partisipasi	Deskripsi
Conscientization	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 94,87% atau 221 responden menyatakan tidak mengetahui/tidak sadar adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar dan hanya 3, 89% atau 9 (sembilan) responden yang menyatakan sebaliknya. • Penerimaan terhadap pemimpin perempuan, sebanyak 81,15% atau 189 responden menyatakan setuju perempuan sebagai pemimpin, 11,17% atau 26 responden menyatakan sangat setuju, 6,87% atau 16 responden menyatakan kurang setuju, dan 0,86% atau sebanyak 2 (dua) responden menyatakan tidak setuju.
Participation	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 73,80% atau 172 responden menyatakan tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan desa dan hanya 26,18% atau 61 responden yang menyatakan ikut terlibat. • Mayoritas/sebanyak 82,80% yakni 193 responden menyatakan tidak terlibat dalam Musyawarah Desa dan hanya 17,17% atau 40 responden yang menyatakan ikut terlibat.
Control	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terlibatnya perempuan desa dalam organisasi kemasyarakatan serta dalam proses pengambilan keputusan desa, berdampak langsung pada lemahnya kontrol perempuan desa dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Sumber : Diolah Pengabdi, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa tiap level dalam WEF, menunjukkan adanya kesenjangan gender di Desa Senggreng. Pada aspek kesejahteraan, terdapat kesenjangan dalam aspek pekerjaan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), tingginya jumlah penerima bantuan sosial, adanya persoalan gangguan kesehatan mulai gangguan ringan hingga berat yang dialami oleh warga desa perempuan, serta adanya isu kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pada aspek akses, tampak kesenjangan pada akses menuju fasilitas umum seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas desa, kondisi pelayanan kesehatan, serta masih belum tampaknya anggaran spesifik gender yang dikhususkan untuk perempuan dan anak. Selain itu, akses politik perempuan juga masih lemah, hal ini tampak dalam konteks organisasi kemasyarakatan desa serta dalam proses pengambilan keputusan desa seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Pada aspek kesadaran, yang disebutkan sebagai keadaan paham terhadap konsep gender serta seluruh dampaknya dalam kehidupan. Dalam kegiatan pengabdian ini, kesadaran merujuk pada pengetahuan dan pengakuan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang berlangsung. Selain itu, aspek kesadaran ini juga dikaitkan dengan persepsi warga perempuan terhadap kepemimpinan perempuan yang mencakup tidak hanya persepsi namun juga model kepemimpinan perempuan yang berlangsung serta harapan terhadap pemimpin perempuan.

Kemudian pada aspek partisipasi, yang terkait dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki di setiap level. Dalam kegiatan ini aspek partisipasi dilihat dari dua

aspek yakni partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan desa. Karena lemahnya akses perempuan dalam organisasi kemasyarakatan serta pertemuan pengambilan keputusan desa, maka rendah pula partisipasi mereka dalam dua kegiatan tersebut.

Terakhir adalah kontrol, yang mengacu pada kondisi setara dalam mengendalikan semua sumber daya dan manfaatnya. Karena akses dan partisipasi yang rendah dalam organisasi kemasyarakatan serta dalam proses pengambilan keputusan desa, maka kendali perempuan terhadap sumber daya dan manfaatnya juga pasti rendah. Berdasarkan data yang ada, maka perempuan Desa Senggreng tampaknya belum sampai pada tahap memegang kendali dalam kerangka WEF.

D. Kegiatan Diskusi dan Penyampaian Rekomendasi

Setelah proses analisis selesai, berikutnya diselenggarakan pertemuan serah terima hasil analisis gender dan perancangan PUG yang melibatkan tim pengabdian dengan pemerintah desa. Proses serah terima dilakukan dengan tahapan antara lain pemaparan dari tim pengabdian, dilanjutkan diskusi dan diakhiri penyampaian rekomendasi-rekomendasi. Kegiatan penutupan ini ditujukan sebagai upaya memberi pemahaman mengenai *existing condition* terhadap Pemerintah Desa, memberi motivasi untuk mendorong implementasi PUG agar kesetaraan gender dapat diwujudkan.

Berkenaan dengan rekomendasi, detail rekomendasi telah dipilah ke dalam tiga kategori yakni upaya pemenuhan kebutuhan spesifik gender, kebutuhan praktis gender, serta kebutuhan strategis gender berikut ini :

Tabel 2. Rekomendasi Perancangan Kebutuhan Gender

No	Kebutuhan Spesifik Gender	Kebutuhan Praktis Gender	Kebutuhan Strategis Gender
1	Pemberian makanan tambahan dan asupan vitamin untuk ibu hamil	Pelatihan guru paud dan TK sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.	Pembatasan sampah plastik serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2	Pemberian makanan tambahan dan asupan vitamin untuk anak	Pemberdayaan ekonomi perempuan desa	Penyusunan Peraturan Desa yang melindungi perempuan dan anak
3	Pemberian catering makanan harian dan asupan vitamin untuk <i>senior citizen</i> yang membutuhkan	Mengembangkan pengelolaan PAUD dan TK menjadi tempat penitipan anak	Melaksanakan Musrenbang Desa khusus/terpisah untuk kategori warga desa perempuan.
4		Penyediaan angkutan oleh pemerintah desa, bagi warga yang butuh mengakses pelayanan kesehatan.	

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Kebutuhan spesifik gender adalah kebutuhan sesuai kebutuhan jenis kelamin tertentu, dengan tujuan melindungi fungsi reproduksi mereka, serta melindungi harkat martabatnya sebagai manusia. Kebutuhan praktis gender adalah upaya kebutuhan dasar yang dapat langsung dinikmati, yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan jangka panjang seperti pola pikir dan perilaku, sehingga mampu meningkatkan posisi perempuan (dan laki-laki).

Dalam rangka upaya memenuhi tiga bentuk kebutuhan gender tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Desa Senggreng yang meliputi multi aktor desa di antaranya perwakilan pemerintah desa, perwakilan BPD, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa. Pokja dapat diarahkan untuk bekerja memastikan seluruh kebutuhan teknis terpenuhi seperti pelaksanaan Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement (GBS), yang oleh pemerintah pusat ditempatkan sebagai dua alat implementasi PPRG.

E. Keberhasilan Kegiatan

Sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah disampaikan pada bagian metode, kegiatan perancangan PUG dengan metode WEF di Desa Senggreng kabupaten Malang disebut berhasil apabila mencapai output sebagai berikut :

1. Pertemuan pendahuluan, berhasil terlaksana dengan adanya pemahaman dan kesepakatan bersama, yang termaktub dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara tim pengabdian dengan Pemerintah Desa Senggreng.
2. Kegiatan pengumpulan data existing condition perempuan desa, berhasil terlaksana dengan terkumpulnya dokumen-dokumen desa seperti profil desa dan anggaran desa, serta terlaksananya kegiatan survei *existing condition* terhadap 233 orang warga desa perempuan.
3. Kegiatan analisis gender, berhasil terlaksana dengan adanya dokumen laporan yang berisi analisis kesenjangan gender berdasarkan WEF.
4. Penyampaian rekomendasi dan diskusi, berhasil terlaksana berdasarkan adanya pertemuan penyampaian hasil analisis gender serta rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Desa Senggreng.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis gender yang dilakukan dalam kerangka Women's Empowerment Framework (WEF) dari Longwe, sejumlah isu tampak dialami oleh warga perempuan di Desa Senggreng, kabupaten Malang. Pada lima aspek WEF tampak muncul kesenjangan gender baik pada aspek kesejahteraan yang berbasis ekonomi, aspek akses yang berkaitan dengan akses pelayanan publik termasuk akses politik, aspek kesadaran terhadap kesenjangan gender, aspek partisipasi di setiap level pengambilan keputusan, serta aspek kontrol terhadap sumber daya. Berbasis hasil analisis WEF tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun rekomendasi-rekomendasi dengan mengacu pada tiga kategori yakni kebutuhan spesifik gender, kebutuhan praktis gender, serta kebutuhan strategis gender.

Sebagai hasilnya, kegiatan perancangan PUG telah menghasilkan perubahan terhadap khalayak sasaran. Di antara perubahan tersebut antara lain adalah perubahan pada aspek kognitif serta motivasi untuk mengimplementasikan PUG bagi Pemerintah Desa Senggreng. Pasca berlangsungnya kegiatan, pemerintah desa memperoleh pengetahuan terkait persepsi masyarakat terhadap 7 (tujuh) isu gender di antaranya isu kesehatan, isu pendapatan, isu perempuan dan anak, isu partisipasi masyarakat, isu akses dan fasilitas desa, isu kepemimpinan perempuan, serta isu perekonomian desa. Tidak berhenti pada aspek pengetahuan, karena tim pengabdian dari universitas Brawijaya juga memberikan motivasi-motivasi bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan hasil Perancangan PUG, menjadi program/kegiatan nyata sebagai upaya perbaikan kualitas hidup perempuan desa.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis berterima kasih kepada FISIP Universitas Brawijaya, yang telah membiaya pelaksanaan kegiatan melalui skema hibah pada tahun 2023. Tim penulis juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Senggreng sebagai mitra

pengabdian, yang telah bersama-sama berkomitmen memperbaiki kualitas hidup warga desa perempuan.

Referensi

- Aryani, L., & Kusumaningrum, R. (2023). Socialization of the Village's Sustainable Development Goals (SDGs) Program in Determining the Direction of Village Development in Karawang Regency. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(3), 609–618. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Batu Times. (2022). *Cegah Munculnya Kemiskinan Baru, Desa Senggreng Kembali Dapat Penghargaan dari Bupati Malang*. <https://Batu.Jatimtimes.Com/Baca/278809/20221129/073700/Cegah-Munculnya-Kemiskinan-Baru-Desa-Senggreng-Kembali-Dapat-Penghargaan-Dari-Bupati-Malang>.
- BPN2TKI. (2019). *Pengumuman Indeks*. <http://portal.bnp2tki.go.id/pengumuman/indeks>
- BPS Kabupaten Malang. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020-2022*. <https://Malangkota.Bps.Go.Id/Indicator/26/512/1/Indeks-Pembangunan-Manusia-Ipm-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Jawa-Timur.Html>.
- Creswell, J. W. & J. D. C. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Nawir, D., Noviyanti, N.I., Cahyaningrum, W., & Gusriani, G. (2023). Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 68–72. <https://doi.org/10.56799/joongki.v2i1.1266>
- Jumiati, E. (2020). Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatuh Kabupaten Purwakarta. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i2.272>
- Fatmawati, Kurniawan, F., & Setiawati, D. (2023). Musyawarah: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Membangun Desa Adil Gender Di Kecamatan Kedungkandang. *Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.572349/musyawarah.v2i1.239>
- Husna, I.M., & Haryanti, R.H. (2021). Gender analysis in empowering women-headed family in Mojosongo Village, Surakarta. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 198–211. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i2.10237>
- Javasatu. (2022). *Desa Senggreng Ukir Prestasi Lagi, Juara 1 Kader KB Se-Jatim*. <https://Javasatu.Com/Berita/Desa-Kita/Desa-Senggreng-Ukir-Prestasi-Lagi-Juara-1-Kader-Kb-Se-Jatim/>.
- Kusuma, N., Nurjannah, S., & Solikatun. (2022). Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Membangun Desa Adil Gender Di Desa Sapit Kecamatan Suela. *Prosiding PEPADU*, 4, 66–70. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/157>
- Malang Times. (2022). *Kades Senggreng: Anugerah Desa Terbaik TIK Langkah Awal TIK Kabupaten Malang Jadi Percontohan Nasional*. <https://Www.Malangtimes.Com/Baca/87930/20221212/155100/Kades-Senggreng-Anugerah-Desa-Terbaik-Tik-Langkah-Awal-Tik-Kabupaten-Malang-Jadi-Percontohan-Nasional>.
- Malangkab. (2022). *Hadiri Bersih Desa Senggreng, Bupati Sanusi Dorong Inovasi Kepala Desa*. <https://Malangkab.Go.Id/Mlg/Default/Page?Title=malangkab-Pusat-Opd-Bupati-Malang-Berikan-Apreasi-Atas-Inovasi-Kepala-Desa-Senggreng>.

- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspiraso*, 2(2), 121–136. <http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/>
- Hafida, S.H.N. (2019). Pemberdayaan Perempuan sebagai Bentuk Penguatan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Situasi Bencana di Kabupaten Klaten. *Jurnal SOLMA*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.29405/solma.v8i1.3058>
- Susanti, R., Syakira, A., Adisti, S., Juliana, S., Utomo, A. A., & Gender, K. (2023). Pengarusutamaan Gender Dengan Mengembangkan Dari Limbah Kelapa. *Communnity Developmen Journal*, 4(4), 8819–8826. DOI: <http://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19927>
- Ulya, S. F., Sukestiyarno, YL., & Hendikawati, P. (2018). Random Sampling Confidence Interval. *UNNES Journal of Mathematics*, 7(1), 108–119. <https://lib.unnes.ac.id/57736/>
- UNRWA. (2011). *International Women's Day: Refugee Women Tell Their Stories*. <https://www.unrwa.org/newsroom/features/international-women%E2%80%99s-day-refugee-women-tell-their-stories>
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.4887>
- Wahyuni, S., Elsera, M., & Niko, N. (2023). Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Desa dan Anggaran Responsif Gender di Desa Duara , Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4, 2–7. DOI: <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i4.267>
- Winarti, E., Martianawati, M., Lutfiasari, D., & Mujiono, F. D. (2023). Pelatihan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Kota Kediri. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(2), 111–120. DOI: <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i2.4631>

Penulis:

Juwita Hayyuning Prastiwi, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. E-mail: juwita_hayyu@ub.ac.id

Andy Ilman Hakim, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. E-mail: andyilmanhakim@ub.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Prastiwi, J.H., & Hakim, A.I. (2024). Perancangan Pengarusutamaan Gender dengan Menggunakan Women's Empowerment Framework di Desa Senggreng Kabupaten Malang. *Jurnal Panrita Abdi*, 8(4), 739-753.